

Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

Analisis Kritis Tuduhan Terorisme terhadap Islam
Prayudi

Pelaku Media dalam Memandang Persoalan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Susilastuti D.N.

Analisis Penetapan Biaya Pelayanan Perguruan Tinggi
Susanta

Pengaruh Tingkat Pendidikan Sekolah terhadap Motivasi Bekerja sebagai Petani di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY
Hari Waluyo Sedjati

Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kemudahan Penggunaan, Sikap, dan Adopsi Simbolik Teknologi Informasi
Adi Suprpto

Creative Industries and Student Enterpreneurial Spirit (Study on the Students of Informatics Techniques UPNVY)
Sri Suryaningsum



Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

PENANGGUNG JAWAB
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

REDAKTUR PELAKSANA
Didik Indarwanta

WAKIL REDAKTUR PELAKSANA
Harmiyati

PENYUNTING AHLI
Mochtar Mas' oed (UGM)
Purwo Santoso (UGM)
Agus Dwiyanto (UGM)
Ana Nadya Abrar (UGM)

DEWAN PENYUNTING
Muh. Edy Susilo
Sigit Haryono
Anik Yuniarti

BENDAHARA
Ida Wiendijarti

SIRKULASI & DISTRIBUSI
Sugiarto
Christian Hernowo

ALAMAT REDAKSI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 485268, 486991
Fax. (0274) 487147

Paradigma diterbitkan empat kali dalam satu tahun sebagai media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian sosial dan politik serta masalah-masalah yang menyangkut faktor penyebab, im
maupun analisis menyeluruh kebijakan baik di sektor pemerintah maupun swasta

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitian dan resensi buku.

Redaksi berhak untuk menyunting isi naskah tanpa mengubah substansi.

Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

DAFTAR ISI

1 - 16

Analisis Kritis Tuduhan Terorisme terhadap Islam
Prayudi

17 - 34

Pelaku Media dalam Memandang Persoalan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Susilastuti D.N.

35 - 44

Analisis Penetapan Biaya Pelayanan Perguruan Tinggi
Susanta

45 - 52

Pengaruh Tingkat Pendidikan Sekolah terhadap Motivasi Bekerja sebagai Petani di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY
Hari Waluyo Sedjati

53-81

Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kemudahan Penggunaan, Sikap, dan Adopsi Simbolik Teknologi Informasi
Adi Suprpto

82-91

Creative Industries and Student Entrepreneurial Spirit (Study on the Students of Informatics Techniques UPNVY)
Sri Suryaningsum

PELAKU MEDIA DALAM MEMANDANG PERSOALAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Susilastuti DN

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fisip UPN "Veteran" Yogyakarta"

Korespondensi: email : susilastuti_dn@yahoo.com

Webside: susilastuti.wordpress.com

Abstract

The press, both print and electronic play an important role in realizing national unity. Through preaching, the press will show the existing realities in the community about the need for unity to build this nation out of the complexity of the problems faced. Formulation of the problem in this research is "How Representations of the press in knitting national unity". The purpose of this study are (1) Identify the role to be played by the press in Indonesia to participate knit unity of the nation, (2) Identify the implementation of peace journalism in Indonesia. Research methods used in this research is that qualitative methods do not test hypotheses. The informant of this research is a journalist members of PWI (Indonesian Journalists Association) Branch of Yogyakarta.

The national press as a social institution in the political system as a whole serves as a bridge between the existing political structures in society that is between the political infrastructure of the political superstructure, between the political superstructure, between the political infrastructure. As a bridge connecting the press should be solid. This robustness can be built by developing new profesionalisme and journalism. Journalism that developed the national press should no longer be chronological but comprehensive including through the development of insightful journalism, peace journalism through in-depth coverage and investigative reporting. If this can be built so that would develop in Indonesia is an independent press is the press who can choose which one is proper and does not deserve to be preached, where the information you need and do not need to be developed.

Keywords: representation, national unity

I.Latar Belakang

Diakui atau tidak secara langsung maupun tidak langsung pers telah ikut memainkan peran penting terhadap proses perubahan bangsa ini. Tatkala pasca reformasi, banyak kalangan mempertanyakan kembali rasa nasionalisme masyarakat, pers melalui pemberitaannya memberitakan peran serta masyarakat Indonesia tanpa melihat suku, agama, status sosial.

Hal ini tampak tatkala ada beberapa pemberitaan yang "dianggap" oleh bangsa Indonesia melecehkan maka segera muncul solidaritas dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah pemberitaan tentang klaim Malaysia terhadap beberapa kekayaan budaya Indonesia, termasuk klaim atas blok Ambalat

yang sarat kekayaan sumberdaya alam.

Persatuan dan kesatuan bangsa juga tampak tatakala ada sebagian masyarakat di Indonesia mendapat musibah bencana alam, seperti bencana alam Tsunami di wilayah Barat Nanggroe Aceh Darussalam serta sebagian Sumatera Utara tanggal 26 Desember 2004. Badai yang berlangsung tidak lebih dari 1 jam telah merenggut kurang lebih 100 ribu orang, serta kerusakan materiil dan non material. Peran serta masyarakat juga tampak tatkala tanggal 26 Mei 2006 kembali gempa bumi tektonik meluluhlantakkan sebagian wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Gempa bumi tektonik berkuatan 5,9 skala richter yang telah merenggut 4.715 jiwa penduduk di DIY dan 1.063 jiwa penduduk Jawa Tengah, belum lagi korban yang luka dan ratusan ribu rumah rusak berat.

Berkaitan dengan itu maka pers mempunyai fungsi strategis karena pers akan melakukan *public security* atas jalannya sebuah peraturan di masyarakat. Persoalannya bagaimana *public security* yang dijalankan pers juga mendidik semua komponen masyarakat Indonesia mempunyai perspektif kebangsaan.

Peluang pers untuk menjalankan perannya sebagai *public security*, khususnya untuk mengawal keutuhan NKRI sebenarnya terbuka lebar karena adanya jaminan kebebasan pers yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sesuai dengan amanat pasal 28 UUD 1945.

Jaminan itu juga bisa dilihat dengan disyahkannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan jaminan hak publik, termasuk media mendapatkan informasi dari Badan-badan Publik. Pers mempunyai ruang gerak yang cukup untuk mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik, dalam hal ini untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun eforia kebebasan pers ini seringkali menyebabkan pelaku media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mengabaikan prinsip-prinsip profesionalismenya antara lain (1) laporan pers hendaknya akurat dan faktual, (2) laporan hendaknya obyektif dengan memperhatikan keberimbangan, fair (adil), tidak bias, tidak diskriminatif dan tidak berprasangka.

Dalam melihat peran media ini, terutama untuk membantu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa seringkali hanya melihat hasil dari pemberitaan, tetapi kurang melihat bagaimana pelaku media dalam melihat satu persoalan atau fakta di masyarakat. Meningat, produk pemberitaan adalah hasil perjalanan panjang pihak-pihak yang ada di bagian redaksi, mulai dari pelaku media, redaktur p liputan, redaktur halaman, redaktur pelaksana di mana mereka inilah yang menjadi *gate keeper* sebelum

informasi yang telah diolah oleh wartawan di muat untuk disajikan kepada khalayak pembaca.

Untuk itu menarik meneliti bagaimana pelaku media (wartawan-red) dalam melihat persoalan-persoalan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun juga wartawan adalah ujung tombak sebuah media dan yang bersentuhan langsung dengan fakta di lapangan.

Berkaitan dengan hal itu sangatlah penting untuk melakukan satu kajian bagaimana meningkatkan peran pers untuk ikut merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana representasi pers dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana representasi pers dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa?

Pemberitaan merupakan hasil dari proses kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, mengolah satu fakta menjadi sebuah berita, di mana didalamnya terlibat berbagai pihak dengan tugas dan kewenangan dalam sebuah institusi media. Wartawan sebagai pelaku media menjadi ujung tombak sebuah media. Wartawanlah yang bersentuhan pertama kali dengan fakta di masyarakat sehingga pemahaman wartawan mengenai persoalan kebangsaan akan sangat strategis agar media bisa lebih meningkatkan perannya dalam ikut merajut persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian tentang representasi pers dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa mempunyai tujuan (1) Mengidentifikasi peran yang harus dimainkan pers di Indonesia untuk ikut merajut persatuan dan kesatuan bangsa, (2) Mengidentifikasi implementasi jurnalisme damai di Indonesia. Manfaat (1) Menambah kajian literatur tentang peran media dalam ikut merajut persatuan dan kesatuan bangsa, (3) Menambah kajian penelitian tentang peran media di masyarakat, (4) Menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama

Kerangka Teoritis

Nasionalisme

Sesuatu hal yang sering terlihat dalam kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah hilangnya rasa percaya antar sesama komponen bangsa. Mempertanyakan makna nasionalisme dan menggugat persoalan kebangsaan. Situasi ini memicu persoalan semakin melunturnya rasa kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah, serta sikap saling mencurigai antar sesama.

Refleksi kondisi itu tampak banyaknya komentar masyarakat bahwa elit politik tidak bisa dipercaya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri serta kepentingan partai mereka. Pada aspek yang lain sesama elit pemerintah seringkali terjadi saling serang pendapat yang membingungkan masyarakat awam. Banyak gagasan yang disampaikan oleh para elit yang sedang berkuasa justru dikritik dan dicerca tanpa memberi peluang kepada para elit untuk melaksanakan gagasannya.

Di sisi lain di tingkat infrastruktur politik terjadi konflik horisontal yang bernuansa SARA, seperti konflik di Sampit, Poso, Ambon. Keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti Aceh, Papua, menjadi masalah cukup kompleks yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Selain itu banyak permasalahan sosial yang bersifat patologis yang menghinggapi kehidupan masyarakat seperti semakin meningkatnya angka kriminalitas, peredaran narkoba dan premanisme dalam berbagai bentuk.

Kondisi-kondisi di atas seakan-akan memberikan gambaran bangsa kita ibarat selembar kain yang tercabik yang tidak bisa menampilkan sosok sebagai bangsa yang utuh. Dalam kondisi seperti ini, akan sulit bagi bangsa ini untuk keluar dari krisis multidimensional yang saat ini sedang dihadapi. Bangsa Indonesia seakan-akan kehilangan perekat yang dapat mempersatukan seluruh warganya.

Krisis yang dialami bangsa Indonesia memang memilukan dan berlangsung begitu cepat. Simbol-simbol kebanggaan terhadap bangsa secara perlahan mulai runtuh akibat lambannya kita bangkit dari masalah ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Negara lain seperti Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina yang juga terimbas krisis ekonomi global telah kembali pulih. Tragedi nasional yang terjadi dalam beryurut-turut sejak tahun 2004 hingga awal tahun 2007 semakin memperpuruk kondisi bangsa ini. kebanggaan terhadap bangsa ini.

Ben Anderson menyatakan, bahwa salah satu sebab mengapa ikatan kebangsaan demikian kuat adalah adanya akar kultural yang mendekati religius yang menopang komunitas dihadapan diskontinuitas. Bangsa-bangsa selalu membayangkan secara samar-samar suatu masa lalu yang tak terlupakan, bahkan meluncurkan masa depan yang tidak terbatas. Negara bangsa serta nasionalisme sebagai bentuk konkretnya adalah sebuah produk peradaban baru yang tidak bisa ditemukan presedennya di masa lalu (Faruk HT, 2001: 67-69)

Nasionalisme Indonesia yang diwacanakan secara resmi adalah nasionalisme yang artifisial yang dirajut dari untaian etnisitas dan silang menyilang ikatan primordial. Artinya, terdapat unsur kesengajaan dan upaya yang sistematis, termasuk didalamnya rekayasa politik (*political engineering*) dalam menempatkan nasionalisme kita. Dalam merakit nasionalisme ini kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah telah dijadikan pengikat rasa kebangsaan lintas etnis. Institusi sosial politik dibiarkan berlanjut dan bahkan didayagunakan dengan diberi baju hukum baru (Purwo Santoso, 2001:266)

Namun demikian tidak dapat diingkari bahwa selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru rekayasa politik yang ditempuh pemerintah dengan mensosialisasikan event-event sejarah seperti Sumpah pemuda, hari Kebangkitan Nasional dan lainnya telah membawa sentimen nasionalisme yang dihasilkan dan disimbolisasi dari perasaan

atau imajinasi masyarakat. Masyarakat Indonesia seperti dibayangkan sebagai suatu entitas karena adanya kesamaan latar belakang sejarah dan kebersamaan dalam meniti perjalanan sejarah.

Pers

Pers merupakan lembaga social dari institusi social secara keseluruhan. Institusi pers akan berinteraksi dengan instusi lain dalam masyarakat. Malvin De Fleur, Ball Rokeach (1982:18) mengemukakan, keberadaan institusi media massa, termasuk pers merupakan salah satu komponen bagian lain yang ada dalam struktur sosial.. Keberadaan media adalah untuk menjaga keseimbangan antar komponen yang ada dalam masyarakat. Hal ini mengandung pemahaman sebagai bagian dari sistem, media pers sebagai subsistem komunikasi massa merupakan sarana yang memungkinkan institusi-institusi lain berjalan. Pers menjalankan fungsinya dengan menyampaikan informasi. Nilai informasi ini ada kaitannya dengan keberadaannya dalam institusi sosial. Artinya, pers dapat menjalankan fungsi politik, ekonomi atau sosio kultural (Ashadi Siregar, 1989:6).

Ditinjau dari teori sistem, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi di lain pihak juga mempengaruhi lingkungan probabilistik yang berarti hasil operasinya tidak dapat diduga secara pasti (Onon U Effendy, 1993:37). Dalam konteks ini sebagai sistem terbuka pers cenderung untuk mempunyai kualitas penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Apabila pers tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ia akan mati, mati karena dimatikan atau mati karena tidak disukai khalayak.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya pers sangat ditentukan oleh lingkungannya di mana pers tersebut berada karena pada dasarnya fungsi dan perannya bersifat relatif. Artinya, pers pada hakekatnya lahir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam

sebagai konsekuensinya pers tidak mempunyai kehidupan yang mandiri. Pers sebagai institusi sosial senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan yang lain.

Struktur sosial, politik sangat menentukan corak serta tujuan yang hendak dicapai oleh pers. Pers sebagai bagian dari komunikasi massa ikut ambil bagian dalam proses perubahan masyarakat pada umumnya, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Pers pada hakekatnya dapat memberikan sumbangan yang besar bagi perubahan sosial. Menurut Emery, Ault, Age, pers mempunyai fungsi untuk memberikan informasi yang obyektif kepada pembaca tentang apa yang dapat membahagiakan masyarakat, negara dan dunia. Selain itu juga memberikan komentar lewat editorialnya agar memperoleh petunjuk perkembangan yang saat ini menjadi perhatian dan juga memberikan informasi tentang barang-barang yang dibutuhkan lewat advertensi atau iklan (Edwin Emery, Philip H Ault, Agee K Warren 1966:174).

Selain itu pers juga bisa dilihat dari aspek kehadirannya dalam masyarakat. Pers sendiri dalam eksistensinya bisa di lihat melalui *dichotomy theory*. Dalam teori ini pers pada belahan pertama di lihat sebagai lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mengutamakan sifat-sifat idiil. Di sini orang melihat kehadiran dan kemanfaatan pers bagi masyarakat dari nilai-nilai pesan yang dibawakannya, baik yang berupa pemberitaan, ulasan maupun pandangan-pandangannya. Pada belahan lain, pers dilihat sebagai perusahaan, sebagai ialah badan usaha pers motifnya mencari keuntungan dari uang langganan maupun iklan. Di sini para penerbitlah yang akan menentukan mengenai segi kepentingan mana yang mereka utamakan, segi idiilnya atau segi komersialnya.

Dalam perkembangannya teori dikotomi ini dikembangkan menjadi teori trikotomi di mana eksistensinya dilihat dalam tiga belahan. Teori yang dicetuskan oleh A.J. Liebling (T Atmadi, 1985:2-4) ini memberikan dimensi tambahan

dalam mengadakan pengamatan kehidupan pers yaitu wartawan yang menyelenggarakan isi pemberitaan. Wartawan di sini dilihat sebagai variabel yang menentukan warna dan corak suatu penerbitan pers karena pada dasarnya isi pemberitaan suatu media dikerjakan oleh wartawan melalui kegiatan jurnalistik. Wartawanlah yang akan mengungkapkan realitas yang ada dalam masyarakat dalam bentuk tulisan sehingga keragaman isi media sangat tergantung bagaimana wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Pers juga ikut menentukan untuk terciptanya kehidupan yang demokratis. Menciptakan kehidupan yang demokratis memerlukan satu kultur yang menunjang, penerimaan prinsip-prinsip yang mendasari kebebasan yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berpolitik, ditegakkannya supermasi hukum, hak-hak asasi manusia dan lainnya. Pemahaman demokrasi dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman yaitu secara normatif dan empirik.

Pers akan bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik bila ada ruang gerak yang diberikan oleh pemerintah yaitu adanya kebebasan pers. Amin Rais mengemukakan, kebebasan pers juga merupakan kunci dalam mendorong demokratisasi karena sesungguhnya apa yang dinamakan sebagai partisipasi sosial, kontrol sosial dan tanggung jawab sosial bisa baik bila ada kebebasan pers. Namun ada kalanya pers tidak mampu mengembangkan iklim demokratik yang membuka kesempatan untuk adu argumen dari masyarakat (Amin Rais, 1986).

Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya tadi pers juga harus dijamin kebebasannya karena kebebasan pers merupakan persoalan yang paling hakiki bagi kehidupan pers. Namun kebebasan juga merupakan persoalan yang mutli kompleks karena sangat terkait erat dengan peta politik yang ada dalam satu negara. Penegakkan kebebasan pers sangat dipengaruhi bagaimana perlakuan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara terhadap pers yang tercermin dalam

regulasi tentang pers, bagaimana pers mensikapi kebebasan yang diperolehnya dalam menjalankan peran dan fungsinya serta tergantung bagaimana masyarakat (khalayak) memaknai kebebasan itu.

Pers untuk bisa menjadi pendorong demokratisasi, dalam melaksanakan kebebasan pers tetap dituntut untuk memperhatikan akurasi dan *fairness*. Akurasi mengandung makna ketelitian, kecermatan dan ketepatan. *Fairness* (berimbang) mengandung arti pers memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam perbedaan atau pertentangan pendapat untuk mengemukakan visi dan pandangan masing-masing. Kedua hal ini merupakan pencerminan dari kejujuran pers dan wartawan dalam menyampaikan satu fakta dengan melakukan peliputan dua sisi (*both side coverage*) (Susilastuti, 1999).

Dalam menjalankan fungsi dan perannya agar bisa mendorong demokratisasi maka pemberitaan pers harus disertai tanggung jawab sosial. Berkaitan dengan tanggung jawab sosial komisi kebebasan pers menggariskan :

- (1) Pers dituntut menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas dalam konteks yang memberi arti pada kejadian itu. Pers dituntut untuk selalu akurat, tidak boleh berbohong, menyatakan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat dan menyajikan berita yang obyektif.
- (2) Pers harus menjadi forum pertukaran komentar dan kritik dengan mengemukakan identitas sumbernya.
- (3) Untuk bisa menjalankan fungsi dan perannya pers hendaknya menonjolkan gambaran representatif dari kelompok/unsur-unsur dalam masyarakat. Pers hendaknya menyajikan kesempatan penuh untuk memperoleh berita sehari-hari (Wisnu Basuki, 1998: 103).

Di Indonesia sendiri pemerintah sebenarnya sudah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kebebasan pers. Menurut Mochtar Lubis ada dua

periode ideal di mana pemerintah memberikan jaminan kebebasan pers. Pertama, pada awal kemerdekaan sampai pemerintahan presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, pada awal pemerintah Orde Baru. Pada kedua masa ini pers diberi peluang untuk melaksanakan tugasnya secara bebas dan bertanggung jawab (Sauir Hutabarat, 1993:457).

Mengingat pers sebagai institusi sosial dalam menjalankan fungsi dan perannya tidak terlepas dari pertanggungjawaban sosialnya kepada bangsa dan negara maka kebebasan pers bukanlah kebebasan yang absolut, bukan pula kebebasan sepihak yang diberikan kepada pemerintah sehingga hanya digunakan untuk mendukung politik dan kebijakan pemerintah yang bersangkutan. Kebebasan pers di Indonesia mengandung hak dan kewajiban untuk perkembangan individu untuk hidup bersama dalam masyarakat.

Representasi

Representasi adalah sebuah fenomena yang, dalam bentuk-bentuk yang berbeda (peristiwa mental, pernyataan verbal, gambar, suara, dll), memperlihatkan sebuah ciri simbolis yang menggantikan obyek itu sendiri, dan dimana obyek itu bisa berasal dari dunia materi, peristiwa, manusia, sosial, ide, dan imajiner.

Representasi adalah konsep yang mempunyai beberapa pengertian. Ia adalah proses sosial dari 'representing'. Ia juga produk dari proses sosial 'representing'. Representasi menunjuk baik pada proses maupun produk dari pemaknaan suatu tanda. Representasi juga bisa berarti proses perubahan konsep-konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk-bentuk yang kongkret. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, dsb. Secara ringkas, representasi adalah produksi makna melalui bahasa. (Nuraini Juliastuti, <http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm> akses tanggal 5 Desember 2008)

Dalam penelitian ini representasi pers dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa tidak melihat produk tersebut telah dihasilkan, tetapi bagaimana proses produk pemberitaan dibuat oleh pelaku media. Pemahaman pelaku media tentang persoalan yang terkait dengan upaya merajut persatuan dan kesatuan bangsa akan berdampak pada karya jurnalistik yang akan dihasilkan. Pemberitaan mengenai fakta yang terkait dengan persoalan persatuan dan kesatuan bangsa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pelaku media (wartawan-red) dalam memandang persoalan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jurnalisme Damai

Jurnalisme damai adalah sebuah kegiatan jurnalistik yang melaporkan suatu kejadian dengan bingkai (*frame*) yang lebih luas, yang lebih berimbang dan akurat yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi. Jurnalisme Damai pada dasarnya memberikan peta jalan baru yang menghubungkan para jurnalis dengan sumber informasi mereka, liputan yang mereka kerjakan dan konsekuensi etis dari liputan tersebut. Jurnalisme damai juga membuka peluang pada pemahaman non kekerasan (*non violence*) dan kreativitas seperti yang diaplikasikan sehari-hari oleh para jurnalis dalam membuat liputan (Anabel McGoldrick Jakel Lynch, 2001:1-2).

Jurnalisme damai adalah praktek jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan tentang hikmah konflik itu sendiri bagi masyarakat. Jurnalisme damai melihat perang atau pertikaian bersenjata sebagai sebuah masalah, sebagai ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam konteks ini, jurnalisme damai pada dasarnya adalah seruan kepada semua pihak memikirkan hikmah konflik. Yaitu dengan senantiasa menggarisbawahi kerusakan dan kerugian psikologis, budaya dan struktur dari kelompok masyarakat yang menjadi korban konflik atau perang (**Harian Kompas, Jumat 22**

Juni 2001 <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/22/nasional/jadi06.htm>)

Jurnalisme damai merupakan laporan jurnalistik yang berperspektif kepentingan bersama untuk tidak mengobarkan konflik lewat media massa jangan hanya menjadi sebuah wacana atau bahan diskusi hangat di forum seminar atau diskusi. Jauh lebih penting adalah bagaimana memunculkan semangat bersama agar bisa membuat paradigma baru dalam penulisan berita tentang konflik. <http://www.isai.or.id/aceh/ind/01/03.html>

Istilah jurnalisme damai pertama kali dikemukakan Johan Galtung Profesor Studi Perdamaian dan Direktur Transcend Peace and Development Network tahun 1970-an (Anabel McGoldrick Jakel Lynch, 2001:20-21). Galtung mencermati banyaknya jurnalisme perang yang mendasarkan pada asumsi yang meliputi masalah olah raga.

Dalam penelitian ini penerapan jurnalisme damai dimaksudkan untuk melihat bagaimana pelaku media melihat persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang muncul di masyarakat yang sekiranya bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaku media harus bisa memilih secara kena dan aktual kejadian-kejadian dan permasalahan masyarakat bangsa dan negara sebagai bahan berita dengan tujuan memperkaya pemasyarakatan dan kesadaran masyarakat kan wawasan kebangsaan dan bela negara (Jacob Oetama, 2001: 392).

Metode Penelitian

Penelitian tentang representasi pers dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang bersifat kualitatif Metode deskriptif kualitatif ini bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang obyektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu (Lexy Moleong, 1990:v). .

Pradikma fenomenologi itu sendiri adalah studi mengenai pengetahuan yang berasal dari

kesadaran. Sebuah fenomenon adalah penampilan sebuah objek atau peristiwa di dalam perspsi manusia. Dalam pandangannya mengenai fenomenologi ini, Merleu-Ponty, misalnya, mengatakan bahwa semua pengetahuannya bahkan pengetahuan saintifik diperoleh dari sudut pandang tertentu yang dia miliki atau dari sejumlah pengalaman yang ia jalani. Fenomenologi menjadikan pengalaman aktual yang ada sebagai data bagi realitas. Fenomenologi memiliki arti membiarkan sesuatu menjadi manifes seperti apa adanya tanpa memaksakan kategori yang peneliti miliki kepada mereka. Menurut Griffin (2000:45) fenomenologi adalah merupakan sebuah tradisi yang menempatkan pada penekanan yang besar pada interpretasi seseorang dari pengalaman subjektif yang mereka miliki.

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Sosiologi fenomenologis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh filsuf Edmund Husserl dan Alfred Schutz. Pengaruh lainnya berasal dari Weber yang memberi tekanan pada *verstehen*, yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah wartawan anggota PWI Cabang Yogyakarta. Informan yang diambil adalah mereka yang telah berpengalaman sebagai wartawan dengan masa kerja di bawah lima tahun, 5-10 tahun dan di atas 10 tahun. Informan yang diambil tidak melihat asal medianya, namun lebih ditekankan kepa statusnya sebagai anggota PWI Cabang Yogyakarta.

Pandangan Wartawan Terhadap Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Masyarakat

Meskipun dalam aktivitas sehari-hari pelaku media selalu berada di tengah masyarakat, namun informan penelitian ini mengakui bahwa

tidak mudah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Di samping indikatornya tidak jelas juga pluralitas masyarakat Indonesia menunjukkan fenomena yang unik.

Artinya, pada saat ada sebuah peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat secara keseluruhan maka tampak sikap solidaritas yang cukup besar untuk saling membantu memecahkan masalah tersebut. Misalnya, tatkala terjadi gempa bumi tsunami di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2004 masyarakat tanpa dikomando berbondong-bondong membantu baik secara individu atau diorganisasi. Demikian juga pada saat terjadi gempa bumi tektonik di Jawa Tengah dan DIY tahun 2006 kepedulian masyarakat untuk membantu masyarakat sangat luar biasa. Rasa ingin 'membela NKRI juga ditampakkan tattala negara menghadapi ancaman dari negara tetangga, misal Kasus Ambalat. Rasa nasionalisme membela tampak sekali, saling perang "kata-kata" melalui dunia maya juga tidak terhindarkan.

'... kalau kita melihat fenomena di masyarakat tatkala ada peristiwa besar kita bersyukur bahwa masyarakat masih peduli terhadap persoalan bangsanya. Hal itu dilakukan secara bersama-sama untuk saling membantu antara sesama....." papar Yusron wartawan SKH Merapi.

Namun sebagian besar informan justru berpendapat bahwa untuk melihat masih kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak hanya dari aspek kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tatkala terjadi peristiwa besar. Justru dilihat bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik atau benturan kepentingan di antara mereka. Ada kecenderungan masyarakat, termasuk mahasiswa di perguruan tinggi dalam menyelesaikan benturan kepentingan dengan anggota masyarakat yang lain dengan kekerasan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tawuran antar mahasiswa, antar anggota masyarakat dan sebagainya. "... dalam masyarakat implementasi persatuan dan kesatuan

bangsa sangat memprihatinkan. Konflik etnis dan golongan semakin menonjol. Ini menunjukkan generasi muda kurang memahami sejatah pendirian bangsa. Situasi ini bila tidak segera disikapi akan menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara...' (wawancara Hudono, redaktur SKH Kedaulatan Rakyat)

".... persatuan dan kesatuan bangsa dalam implementasinya di masyarakat masih terjaga namun ada riak-riak kecil, misalnya konflik horisontal yang mengganggu pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan pluralitas yang ada dalam masyarakat..." (wawancara Adi Prabowo, wartawan SKH Harian Jogja).

Dalam pandangan Ernal Rosa (wartawan RRI Jogja) implementasi persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat justru mengalami penurunan dan telah bereser ke arah persatuan dan kesatuan kelompok kepentingan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan kehidupan dalam masyarakat yang bisa mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"... masih banyak ketimpangan dalam masyarakat yang bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Disisi lain banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bahwa dalam menuju masyarakat global perstuan dan kesatuan diperlukan. Masyarakat banyak yang meragukan bahwa di era global persatuan dan kesatuan bangsa bisa terwujud, terutama kalau melihat realitas banyak terjadi ketimpangan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi dan memicu konflik horisontal..." (wawancara Erwina, M.Si redaktur berita RRI Jogja)

Perubahan sistem politik otoriter yang dibangun pada pemerintahan Orde Baru ke arah kehidupan demokratis yang dibangun pada pemerintahan pasca Orde Baru telah membawa perubahan sikap dalam masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Ego kedaerahan tampak sekali, terutama dalam sistem rekrutment

birokrasi. "... adanya UU tentang Otonomi Daerah (Otda) merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara NKRI karena daerah cenderung mementingkan daerahnya mulai dari bidang pendidikan, tenaga kerja, recruitment birokrasi dan lainnya..."(wawancara Ki Bambang Widodo, redaktur Majalah Pusara).

Implementasi persatuan dan kesatuan dalam masyarakat oleh informan juga dinilai semakin genting. Indikasinya banyaknya kelompok masyarakat yang memaksakan kehendak. Masyarakat banyak menuntut, termasuk ingin memisahkan diri dari NKRI (Wartawan Suara Merdeka, Semarang Asril Sutan Majaro).

Melihat paparan di atas, pada dasarnya wartawan melihat ada persoalan di masyarakat yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perubahan cepat yang terjadi di masyarakat mau tidak mau akan memunculkan kesadaran kolektif, mencari dukungan, mencari kekuatan untuk saling membantu. Inilah yang menurut Jacob Oetama (2001:390) sebagai lahirnya rasa kebersamaan baru, fenomena kebangsaan baru. Kebangsaan baru akan mempengaruhi masyarakat dalam melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun di sisi lain, pada waktu bersamaan, muncul kebutuhan untuk berbung kepada unit-unit yang lebih kecil dan lebih solid, lebih emosional. Unit-unit ini bisa berupa etnis, agama, budaya dan daerah yang tumbuh dalam profesi-profesi. Fenomena ini memberikan gambaran menarik antara arus dan orientasi besar yaitu kebangsaan dan arus-arus lebih kecil, lebih intensif, lebih emosional, agama, budaya, profesi, daerah dan kepentingan. Kondisi ini menyulitkan posisi untuk menggambarkan sejauhmana wajah dan sosok kebangsaan yang masuk dalam masyarakat Indonesia ke berbagai kelompok yang paling keras diterpa perubahan. "...banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya dirancang untuk memperkecil jurang perbedaan dalam masyarakat. Namun dalam implementasinya sering meleset dari tujuan semula sehingga akan

mengikis trust masyarakat kepada pemerintah. Misalnya sederhana, pembagian BLT..." wawancara Mustowa wartawan majalah Suara Muhammadiyah.

Peran yang harus dimainkan pers nasional dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

Pers nasional merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem dalam masyarakat. Pers akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik di mana pers berada. Ini berarti pers juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemberitaannya,

Produk utama pers adalah pemberitaan. Khalayak pembaca atau pemirsa dan pendengar adalah pihak yang akan mengkonsumsi pemberitaan yang dibuat oleh pers. Pemberitaan pers akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung persepsi masyarakat terhadap bangsa dan negaranya. Kalau pers secara terus menerus memblow up masalah konflik maka masyarakat akan melihat bahwa lingkungannya menjadi tidak aman.

Namun kalau pers memberitakan informasi bukan semata-mata tentang konflik tetapi penyebab konflik dan upaya pemecahannya maka masyarakat akan mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap konflik itu sendiri. "... pers nasional perlu memberikan pemahaman kepada khalayak tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menjelaskan persoalan yang timbul bila persatuan dan kesatuan bangsa itu menipis. Pers perlu memberikan background terhadap berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat..."(wawancara Ernal Rosa)

Kalau melihat peran pers secara universal yaitu (1) mendidik, (2) menyampaikan informasi, (3) menghibur, (4) kontrol sosial maka pers dalam menjalankan keempat fungsi universalnya tersebut tidak boleh hanya mementingkan satu aspek saja. Fungsi kontrol sosial seringkali disebut-sebut oleh banyak kalangan harus dikedepankan karena pers merupakan pilar keempat demokrasi.

Artinya, ketiga tiga pilar demokrasi yang lain yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak berfungsi maka pers harus mengambil alih.

Bisa tidaknya pers melaksanakan fungsi kontrol seringkali juga dikaitkan sejauhmana pers diberikan ruang cukup. Indonesia yang sedang mengalami eforia politik di satu sisi dan di sisi lain diberikan jaminan kebebasan melaksanakan peran dan fungsinya yang tertuang dalam UU No 40 tahun 1999 seringkali mengimplementasikannya dengan kurang tepat. Akibatnya, banyak yang menilai pers nasional sering kebablasan. "... keluhan tentang pers sudah kebablasan oleh masyarakat antara lain diwujudkan dalam tuduhan yang mengatakan pers telah mempraktekkkan "jurnalisme anarki", "jurnalisme provokasi", "jurnalisme pelintir..." (RE Siregar, 2001:44)

" ... suka tidak suka kita yang bekerja di media harus menyadari bahwa pers memang menjadi salah satu alat pendidikan masyarakat. Apa yang akan kita sajikan dalam produk pers akan menjadi tolok ukur pendidikan seperti apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Tanpa harus menutupi fakta yang ada di masyarakat kita perlu memikirkan untuk memberikan informasi yang "menyejukkan" kepada masyarakat, menyajikan tulisan yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan..." (Wawancara Herry Purwata, wartawan SKH Republika)

Pers tidak bisa hidup sendirian dengan caranya tanpa memikirkan dampak dari setiap informasi yang disajikan kepada masyarakat. Pers tidak hanya berperan sebagai pelapor berita semata (story teller) dalam setiap kejadian yang ada dalam masyarakat. Pers harus bisa memberikan perspektif terhadap semua informasi yang akan disajikan kepada masyarakat. "... peran pers sangat strategis namun peran ini belum dilaksanakan secara maksimal. Pers perlu memperoleh porsi yang lebih banyak dalam ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat..." (wawancara Sobirin, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat)

Untuk memainkan peran ini maka pers perlu memperhatikan rambu-rambu regulasi yang mengatur pers seperti UU No 40 Tahun 1999, delik pers yang ada dalam KUHP serta Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) yang telah ditandatangani organisasi profesi kewartawanan di Indonesia. "... pers nasional perlu memberikan informasi yang adil dan berimbang dan informasi itu harus bisa dipahami oleh masyarakat pembaca disegala lapisan..." (wawancara Ton Martono, wartawan Majalah Suara Muhammadiyah).

Peran yang harus dimainkan oleh pers tidak berarti pers harus menutupi "fakta" karena bagaimanapun pers harus tetap menjaga obyektifitasnya. Obyektivitas ini dimaksudkan agar pers bisa menyajikan informasi yang seimbang dan adil. "... pers harus ikut terlibat secara inten dalam upaya mempersatukan etnis, golongan, ras demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun demikian pers harus tetap independen tanpa berpihak pada satu golongan..." (Wawancara Hudono, redaktur SKH Kedaulatan Rakyat).

" cover both side mutlak diperhatikan bila pers ingin bisa memainkan perannya sebagai salah satu alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal kecil yang dinilai wartawan bisa memicu konflik dan menimbulkan perpecahan harus diinformasikan secara berimbang. Masyarakat tetap dibuka kesadarannya bahwa ada perbedaan dalam masyarakat, ada konflik dalam masyarakat tetapi melalui pemberitaan perlu diberikan pemahaman perbedaan dan konflik tersebut tetap harus dalam koridor menjaga persatuan dan kesatuan bangsa..." (wawancara dr, Sutomo Parastho, Ketua Dewan Kehormatan Daerah, redaktir Senior Majalah Eksponen dan pemilik Radio Arma Sebelas Yogyakarta)

Berdasarkan uraian di atas maka peran yang harus dimainkan pers pasca Orde Baru tidaklah sederhana. Pers tidak bisa hanya sekedar alat untuk menyajikan fakta, tetapi pemberitaan pers harus senantiasa punya perspektif dan tetap dalam koridor menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

”... kendala utama wartawan tatkala akan mengimplementasikan idealisme untuk menghasilkan berita yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa adalah berita-berita terkait dianggap ”kurang laku” di mata dewan redaksi. Berita yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa ”kalah bersaing” dengan verita hukum, kriminal dan politik sehingga jurnalis menjadi berpikir ulang untuk meliput hal-hal yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa karena takut tidak dimuat, kecuali ada ”order” dari redaksi. ...” (wawancara Junanto wartawan SKH Koran Merapi)

Kebijakan redaksional terkait dengan isu persatuan dan kesatuan bangsa

Tatkala pers telah menjadi sebuah entitas industri banyak pihak yang menyangsikan apakah pers bisa diharapkan menjadi pilar keempat birokrasi. Menurut hasil penelitian Susilastuti (2001), tantangan pers pasca Orde Baru tidak hanya negara sebagaimana pada masa Orde Baru. Regulasi telah memberikan ruang yang cukup bagi pers untuk melaksanakan peran dan fungsinya. Ancaman yang dihadapi pers nasional justru berasal dari masyarakat, wartawan dan industri media itu sendiri.

Pasal 4 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 menyebutkan Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Pasal 4 ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran, pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 4 ayat (4) menyebutkan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kemudian pasal 9 UU No 40 Tahun 1999 menyebutkan, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers yang berbentuk badan hukum

Jacob Oetama mengemukakan, pada dasarnya kebebasan sangat kenyal atau berinteraksi dengan

realitas. Masyarakat Indonesia sangat majemuk Realitas ini harus dipertimbangkan ketika bicara tentang kebebasan karena kebebasan absolut itu tidak ada. Kebebasan pers tidak bisa dilepaskan dari realita di mana pers berada . Kalau kita bicara kebebasan pers, tidak bisa melihatnya dari kaca mata barat karena realitanya memang berbeda. Prinsip dan nilai tentang kebebasan mungkin sama, tetapi ketika akan dilaksanakan tidak dalam keadaan yang sama. Artinya, kalau dilaksanakan dengan melihat realitas yang ada yaitu dari aspek tingkat pendidikan, kesadaran politik (Susilastuti, 2001) .

”... Kita harus melihatkenyataan jangan pernah menganggap pers itu tunggal, pers seperti halnya institusi lain selalu plural sehingga berbagai model dan bentuk pers tentunya sesuai pasar dan idealisme para pengelolanya. Janganlah kita beranggapan pers sesuai dengan idealisme kita. Kita tidak akan mungkin mengharapkan agar pers semua seperti idealisme kita karena selera masyarakat dan idealisasi tidak bisa disamakan kecuali pada negara yang fasis, komunis atau otoriter. Di negara yang bebas pers tentu akan memilih sesuai atau ideal bagi khalayaknya...” (wawancara Leo S Batubara dalam Susilastuti,2001).

Dalam pandangan Jacob Oetama menerbitkan koran adalah satu proses di dalamnya terdapat proses pengawasan dan pengendalian serta konsep mengatur diri. Pers Indonesia dewasa ini *carried away* termakan gelombang kejadian dan peristiwa Padahal pers harus menentukan agenda. Pers adalah refleksi masyarakat sehingga menerbitkan pers bukan untuk diri sendiri melainkan untuk disajikan kepada masyarakat. Di era kebebasan ini pada dasarnya ada kesempatan bagi pers untuk mengatur diri sendiri. (Susilastuti, 2001)

Kebijakan redaksional merupakan salah satu penentu apakah suatu informasi akan diberitakan atau tidak. Wartawan yang merupakan ujung tombak sebuah penerbitan memang yang langsung berhadapan dengan narasumber di lapangan. Namun ketika hasil tulisan sudah dimuat di

media bukan semata-mata tanggungjawab wartawan tetapi menjadi tanggungjawab institusi media di mana wartawan bekerja karena liputan wartawan telah melalui satu proses mekanisme kerja keredaksian.

Dalam pandangan informan penelitian ini kebijakan redaksional memegang peran strategis untuk bisa menghasilkan informasi yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kebijakan redaksional dalam melihat persoalan atau konflik akan menentukan seperti apa yang informasi yang diolah wartawan akan diberitakan. "... kalau background redaksional yang dibangun adalah marketing konflik maka media melalui produk jurnalistiknya akan melihat konflik sebagai alat mendatangkan keuntungan dan mengabaikan sisi idealismenya. Ini yang perlu disadari..." (wawancara Sutomo Parastho).

Kebijakan redaksional memang tidak bisa dilepaskan dari ideologi media tersebut. Pers Indonesia dalam pandangannya tetap mempunyai idealisme walaupun implementasinya berbeda-beda. "... paling penting redaksi perlu membuat buku panduan dalam peliputan yang mendukung persatuan dan kesatuan itu seperti apa? Jajaran redaksi pers di Indonesia perlu punya persepsi yang sama dalam melihat "konflik" yang sekiranya bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa..." (Wawancara dengan Hudono).

Beberapa informan juga melihat kebijakan redaksional di media tempatnya bekerja seringkali belum "mendukung" upaya untuk menjajikan berita yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. "... kita harus akui ada benturan kepentingan bisnis dan idealisme di tingkat jajaran redaksi menyangkut berita yang akan dimuat atau tidak. Redaksi perlu menyamakan visi seperti apakah berita yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa..." (Wawancara Junianto, wartawan SKH Koran Merapi)

Persoalan apakah kebijakan redaksional media sekarang telah mendukung upaya meningkatkan peran pers dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, banyak kalangan yang pesimis

terutama tatkala media telah menjadi sebuah intitas industri. Pemilik media diharapkan "tidak terlalu" ikut campur dalam upaya pers untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pers sebagai industri adalah realita yang tidak bisa dipungkiri. Persoalannya sejauhmana penerbitan pers mengseimbangkan antara kepentingan bisnis dan idil. Dalam suatu ceramah di depan anggota SPS almarhum PK Ojong pendiri *Kompas* mengemukakan, perusahaan surat kabar tidak sama dengan perusahaan sepatu yang dapat diperjualbelikan begitu saja. Akan tetapi surat kabar bukan perusahaan komersial saja, tetapi juga merupakan wadah idil (Jacob Oetama:2000: p.310). Ini mengandung pengertian bahwa segi pers hendaknya tetap tunduk pada aspek idilnya sehingga perkembangan pers sebagai industri tidak dengan sendiri mengubah tujuan pers itu sendiri.

Kendati kebebasan pers telah menghindarkan monopoli informasi dan pendapat oleh sejumlah media, memperbanyak pilihan masyarakat terhadap media penyalur informasi dan pendapat sehingga diharapkan akan bisa membangun toleransi perbedaan dan pertentangan pendapat menuju masyarakat demokratis, namun pers nasional tidak serta merta bisa bebas menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini disebabkan pers nasional tetap belum bebas dari (freedom from) dan kebebasan untuk (freedom for) belum dilaksanakan dengan baik.

Penerapan jurnalisme damai di kalangan pelaku media

Jurnalisme damai adalah solusi yang ditawarkan banyak pihak tatkala akan meliput sebuah konflik dalam masyarakat. Penerapan jurnalisme damai akan memungkinkan pers tidak "gegabah" dalam memberitakan sebuah konflik termasuk mempertimbangkan sejauh mana "konflik" tersebut akan menjadi ancaman bagi bangsa dan negara.

Sejauh ini jurnalisme damai belum familiar di kalangan pelaku media terutama yang ruang

lingkup liputannya bukan di daerah konflik. Namun pelaku media yang menjadi informan penelitian ini mempunyai pemahaman yang sama bahwa jurnalisisme damai membantu wartawan dalam melihat satu permasalahan di lapangan. "... jurnalisisme damai menawarkan solusi dan menuntun jurnalis agar dalam melaksanakan tugas liputannya mengedepankan prinsip keberimbangan, check and balance...." (wawancara Fert Astuti, wartawan majalah Suara 'Aisyiyah).

Walaupun sudah ada kesadaran mengenai hal itu mereka juga melihat bahwa penerapan jurnalisisme damai belum maksimal. Mengingat, jurnalisisme damai masih sesuatu yang baru dan penerapannya masih dipersepsi hanya di wilayah konflik. Akibatnya, implementasi jurnalisisme damai belum maksimal. "... Jurnalisisme damai merupakan situasi ideal untuk mendukung NKRI. Namun hal itu sulit dilaksanakan apabila tidak didukung redaksi yang memadai dan mempunyai visi yang sama, termasuk masyarakat..." (wawancara Adi Prabowo, wartawan Harian Jogja).

Tidak jarang penerapan jurnalisisme damai juga dipersepsikan lain dan tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka ingin pihaknya mendapatkan porsi lebih dalam pemberitaannya. Persoalannya ketika hasil pemberitaan tidak memuaskan pihak-pihak tertentu (bisaperorangan, organisasi atau golongan) maka wartawan terkadang selalu disalahkan dan menjadi korban penganiayaan.

Berdasarkan paparan ini penerapan jurnalisisme damai sebagai solusi untuk meningkatkan peran serta pers dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa masih jauh dari harapan. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pengggagas jurnalisisme damai masih fokus pada wartawan, sementara untuk kalangan redaktur masih jarang. Kondisi ini terkadang menyebabkan benturan antara pekerja media dengan pemilik media.

Implementasi Kebebasan Pers Untuk Mendukung Peliputan yang Mendukung Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pada masa Orde Baru banyak kalangan pelaku pers menuding bahwa kebebasan pers yang terbelenggu menjadi salah satu kendala utama mereka menjalankan peran dan fungsinya. Namun tatkala sudah ada jaminan kebebasan pers oleh pemerintah pasca Orde Baru, kebebasan pers juga dituding menjadi penyebab pelaku pers dalam melaksanakan perannya tidak sesuai harapan.

Harus diakui era kebebasan pers tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku masyarakat pers, terutama banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik wartawan. Lukas Luwarso bahkan secara ekstrem menyebutkan, pelanggaran kode etik jurnalistik disebabkan beragamnya latar belakang orang yang menjadi wartawan. Konon terdengar kabar ada preman yang menjadi pimpinan redaksi, makelar bisa menjadi wartawan. Sindikat perjudian bisa menerbitkan koran (Lukas Luawrso, 2001:124)

Dampak pelanggaran etika profesi yang selama ini mencuat ke permukaan adalah budaya menerima amplop dari narasumber. Budaya amplop sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah menggejala di Indonesia pada dekade 1960-an. Hanya persoalannya amplop sekarang menjadi sesuatu yang "wajib" bagi penyelenggara acara dan peliputnya "wajib" memuat beritanya. Persoalan amplop ini memunculkan istilah wartawan bodrek dan membuat narasumber baik individu, kelompok, institusi swasta atau pemerintah merasa gerah. Muncul berbagai gugatan siapa sebenarnya yang pertama kali memberikan amplop kepada wartawan. Jawaban atas gugatan ini tidak mudah seperti halnya kita bicara ayam dan telur mana yang ada terlebih dahulu?

Berdasarkan paparan ini ada satu benang merah bahwa dalam upaya melakukan penegakkan kebebasan pers di Indonesia banyak persoalan yang harus dibenahi Pada masa

pemerintahan Orde Baru maupun pasca Orde Baru ternyata makna kebebasan pers yang belum bisa diwujudkan. Faktor penyebabnya bersumber dari luar pers itu sendiri (eksternal) yaitu persoalan undang-undang, campur tangan birokrasi dan tekanan masyarakat, sedang dari dalam (internal) berasal dari pemilik maupun wartawan yang menjadi ujung tombak sebuah penerbitan. Dalam kerangka ini maka untuk menegakkan kebebasan pers diperlukan satu pemahaman bersama dan saling pengertian antara pelaku media (pers), pemerintah dan masyarakat tentang makna kebebasan pers itu sendiri yaitu bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan pribadi tetapi kebebasan bersyarat yang sarat dengan tanggungjawab kepada masyarakat, minimal masyarakat pembacanya.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kendala bagi pelaksanaan kebebasan pers melalui beberapa cara yaitu pertama dari sisi aktornya yang mencakup wartawan, pemilik modal, pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Mereka inilah yang sebenarnya mempunyai kewajiban untuk menjaga agar pelaksanaan kebebasan pers bisa terwujud dengan baik.

Pelaku pers yaitu wartawan, misalnya, harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalismenya. Wartawan idealnya harus memiliki tingkat pengetahuan yang memadai, termasuk pengetahuan tentang sistem di mana media bekerja, memiliki skill atau ketrampilan untuk melaksanakan pekerjaannya, memiliki orientasi yang diutamakan untuk kepentingan komunitas dibanding kepentingannya sendiri, memiliki pengawasan diri yang tinggi. John C Merriil seperti dikutip oleh Jacob Oetama mengemukakan, memiliki pers bebas tidak ada artinya, jika lewat pers bebas wartawan tidak melaksanakan, jika wartawannya tidak menggunakan secara maksimal. Wartawan harus mempunyai komitmen terhadap kebebasan pers (2001). Wartawan juga harus memperhatikan Kode Etik Jurnalistik serta ketentuan hukum yang ada. Kemudian jajaran redaksi dalam menurunkan

satu pemberitaan harus memperhatikan apakah kaidah-kaidah jurnalistik sudah tercermin dalam pemberitaan.

Pemerintah sendiri dalam kerangka penegakkan kebebasan pers mempunyai pemahaman bahwa kebebasan membawa konsekuensinya, salah satunya kekritisian dalam memandang kinerja pemerintah. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah yang berkuasa, namun dipandang sebagai masukan bagi pemerintah. Hanya saja pers dalam menyampaikan kritik tetap disertai tanggungjawab dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pemerintah memang mempunyai power untuk membuat regulasi, termasuk regulasi tentang pers. Namun hendaknya power ini tidak digunakan untuk membuat regulasi yang kembali bisa memasung pers nasional.

Sementara itu masyarakat di era kebebasan juga bersikap kritis terhadap pemberitaan media massa, namun dalam penyampaian pemikiran tidak disertai dengan tekanan bahkan pemaksaan. Kontrol masyarakat memang dibutuhkan, tetapi bukan kontrol yang menjurus ke arah anarki dan pemaksaan kehendak. Dalam konteks inilah, masyarakat harus mempunyai kehendak untuk menggunakan rambu-rambu hukum yang ada bila bergesekkan dengan media. Masyarakat hendaknya juga mempunyai pemahaman kebebasan pers akan memungkinkan munculnya beragam pluralisme pemberitaan yang bisa jadi ada yang tidak menyenangkan bagi dirinya, atau kelompoknya sehingga kalau pemberitaan itu memunculkan berbagai pro dan kontra adalah sesuatu yang wajar. Melalui langkah inilah masyarakat akan bisa ikut menjaga pelaksanaan kebebasan pers.

Pada akhirnya pihak-pihak yang bertanggungjawab menjaga pelaksanaan kebebasan pers yaitu pemerintah, masyarakat dan masyarakat pers (pemilik modal dan wartawan) dalam menjalin interaksi tetap memperhatikan aturan atau ketentuan hukum yang ada, antara lain undang-

undang pers, ketentuan delik pers, kode etik dan lainnya. Pemahaman terhadap koridor atau rambu-rambu tersebut akan ikut menumbuhkan satu kesadaran akan makna perbedaan pendapat yang merupakan konsekuensi dari kehidupan masyarakat yang demokratis. Sekiranya ini bisa ditumbuhkan maka harapan bahwa media bisa menjadi media publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat bisa terwujud.

Analisis Kritis

Langkah ideal yang harus ditempuh dalam meningkatkan peran pers ikut merajut persatuan dan kesatuan nasional adalah dengan membangun interaksi dengan pemerintah atau kelompok-kelompok yang lain melalui dialog. Artinya, pers harus membuka diri untuk berdialog dengan semua komponen masyarakat dengan mengabaikan berbagai kepentingan yang ada. Melalui dialog ini akan tercipta saling pengertian.

Pers juga harus didukung oleh wartawan yang profesional yaitu dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya mengikuti kaidah-kaidah yang ada seperti mempertahankan akurasi, keseimbangan, *fairness* dan lainnya. Berkaitan dengan penulisan berita, unsur subyektifitas dari wartawan tetap memainkan peran, lengkap dengan pandangan bias dan pemihakannya terhadap fakta tersebut. Proses memilih fakta berdasarkan asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa prespektif. Dalam memilih fakta selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Salah satu upaya untuk memahami bagaimana pers memberikan pemaknaan terhadap peristiwa adalah bagaimana pers membingkai pemberitaan (*frame*). *Frame* merupakan seleksi atas berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa tersebut menonjol dalam suatu teks komunikasi.

Framing dalam hubungannya dengan penulisan berita dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang secara radikal berbeda bila wartawan mempunyai *frame* yang berbeda atas peristiwa

tersebut dan menuliskan pandangannya dalam berita. Apa yang dilaporkan media sering merupakan hasil pandangan wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa (Bimo, dkk,1999:23).

Masyarakat harus juga memahami apa fungsi pers di masyarakat serta mengetahui bagaimana kinerja jurnalistik. Pemahaman ini penting, oleh karena, proses suatu informasi yang ada dalam masyarakat kemudian dikemas menjadi berita melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Produksi isi pemberitaan pelaku media mulai dari wartawan, redaktur dibatasi oleh (1) teori-teori tentang kerja jurnalistik, (2) aturan-aturan dari media itu sendiri, (3) respon khalayak terhadap fakta tersebut (Agus Sudibyo, 2001:125). Artinya, dalam praktek kerja jurnalistik sehari-hari pelaku media akan memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak pembaca.

Oleh karena itu sangat penting artinya bila seorang pelaku media haruslah benar-benar mengerti tentang sebuah fakta dan peristiwa, agar asumsi dan subyektifitas tidak mengkooptasi secara tidak sengaja dan sengaja atas suatu fakta atau peristiwa. Memang sangat sulit untuk mensterilkan sebuah produk berita dari asumsi dan subyektifitas pelaku media. Namun dengan bekal pemahaman, latar belakang dan wawasan keilmuan serta integritas dari pelaku media kemungkinan kurang baik dan tidak benar itu bisa diminimalisir.

Data dan fakta tentang satu informasi harus memperhatikan akurasi. Artinya, wartawan harus cermat dalam menuliskan sehingga informasi tidak menyesatkan. Harus memperhatikan asas keseimbangan. Artinya, pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan Iptek harus ditulis pada saat bersamaan. Memilih narasumber yang tepat dengan memperhatikan pluralisme yang berkembang, Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan feedback terhadap informasi yang diberitakan oleh pers.

Apabila pers independen ini terwujud

maka masyarakat akan memandang bahwa pers merupakan tempat untuk mengembangkan dialog, tempat untuk bertemunya berbagai perbedaan dalam kerangka persatuan. Pers independen memungkinkan masyarakat untuk ikut menjaga iklim yang kondusif bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka yang lebih mengglobal.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa maka semua komponen masyarakat serta institusi yang ada didalamnya mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu perlu dibangun melalui satu paradigma baru dalam memandang persoalan kebangsaan. Kebangsaan tidak boleh dimaknai secara sempit tetapi harus dimaknai dalam konteks kepedulian terhadap sesama.

Sumber daya manusia Indonesia juga perlu hadir dengan paradigma baru tentang wawasan kebangsaan yaitu melihat pluralisme sebagai suatu kekayaan. SDM yang ada perlu diajak mampu berpikir secara multiparadigma yaitu tidak menaifkan perbedaan tetapi melihat perbedaan sebagai suatu realitas sehingga masing-masing individu tidak mencoba memaksakan pendapatnya kepada kelompok masyarakat yang lain.

Pluralisme tersebut membutuhkan satu wadah untuk mengembangkan satu dialog guna menumbuhkan satu kebersamaan. Dialog perlu dibangun dan difasilitasi, antara lain melalui pers nasional. Pers nasional harus dihindarkan dari kepentingan opini elit dan kelompok mayoritas.

Pers nasional sebagai salah satu institusi social dalam system politik secara keseluruhan berfungsi sebagai jembatan penghubung antar struktur politik yang ada dalam masyarakat yaitu antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, antar suprastruktur politik, antar infrastruktur politik. Sebagai jembatan penghubung pers harus kokoh. Kekokohan

ini bisa dibangun dengan mengembangkan profesionalisme dan jurnalisme baru.

Jurnalisme yang dikembangkan pers nasional harus tidak lagi bersifat kronologis tetapi bersifat menyeluruh antara lain melalui pengembangan jurnalisme berwawasan, jurnalisme damai melalui peliputan mendalam dan peliputan investigasi. Bila ini mampu dibangun maka yang akan berkembang di Indonesia adalah pers yang independen yaitu pers yang bisa memilih mana yang patut dan tidak patut untuk diberitakan, mana informasi yang perlu dan tidak perlu dikembangkan.

Saran

Pelaku pers atau wartawan perlu meningkatkan profesionalismenya sebagai jurnalis agar bisa lebih memainkan perannya untuk bisa menghasilkan tulisan yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Caranya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti penulisan jurnalisme damai.

Radaktur pers perlu menyamakan visi tentang berita yang bisa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Caranya dengan membuat kebijakan redaksional yang bisa menjadi pedoman pekerja media meliput fakta, mengolah fakta untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilik media hendaknya tetap mempunyai idealisme dalam mengelola media. Caranya, dengan tidak terlalu mencampuri kebijakan redaksional. Organisasi profesi perlu meningkatkan kualitas profesionalisme anggotanya. Caranya dengan menyelenggarakan pelatihan.

Daftar Pustaka

- Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Atmakusumah, "Pers Indonesia di tengah Kebebasan dan Ketidakbebasan", makalah stadium generale di Universitas Islam Bandung, 26 April 1999.

- Basuki, Wisnu Basuki, *Pers dan Penguasa: Pembocoran Pentagon Papers dan Pengungkapan oleh New York Times*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Buwono, Sri Sultan Hemengku, ceramah di dialog nasional kebangsaan di JEC Yogyakarta, Maret 2003.
- Chesney, Robert Mc, *Konglomerasi Media Massa Ancaman Baru Terhadap Demokrasi, Aji Indonesia*, 1998.
- Effendi, Onong U, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT Citra Aditya, Bandung, 1993.
- Agge, Edwin Emery, Philip H Ault, *Introduction to Mass Communication*, Dood Mead Company, Inc, 1960.
- Abd Aziz T, *Islam dan Negara Orba(1966-1994)*, Tesis UGM, 1994
- Atmakusumah Astraatmadja, *Kebebasan Pers dan Arus Informasi*, Lembaga Studi Pembagunan, Jakartam 1982
- Feith, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Second Edition, Ithaca, New York, Cornel University Press, 1971.
- Faruk HT, *Imajinasi, reimajinasi dan deimajinasi: Soal Negara-Bangsa dan Kita*, " dalam TH Sumartana (ed) Nasionalisme, Etnisitas L; Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2001 .
- Griffin, Em, *A First Look at Communication Theory*, Mc Grawhill, California, 2000
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999.
- .Hidayat, Komaruddin, , *Menggelorakan Kembali Spirit Keindonesiaan*, makalah dalam seminar nasional "Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, 2003.
- Hikam, AS, *Demokrasi Melalui Civil Society Sebuah Tatapan reflektif Atas Indonesia* dalam Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, 1996 .
- Hutabarat, Saur, *Kemandirian Pers dalam Era Industri dan Kebudayaan Birokrasi*, dalam Tajuk-tajuk Terik Matahari, Hotman Siahaan (ed) Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya, 1993, p.457.
- Kompas 29 Maret 1999
- Nugroho, Bimo, Eriyanto dan Frans Surdiasis, *Politik Media Mengemas Berita; Habibie dalam pemberitaan Kompas, Merdeka dan Republika*, ISEI, Jakarta 1999,
- Nuraini Juliastuti, <http://kunci.or.id/esai/news/04/representasi.htm> akses tanggal 5 Desember 2008)
- Mardiansyah, Arrochman, *Negara Bangsa dan Konflik Etnis*, Jurnal JSP Volume 4 Nomor 3 Maret 2001
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penulisan Kuantitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005
- uhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996
- Oetama, Jacob, ceramah sosialisasi BIKN dan Dewan Pers Independen, Yogyakarta, 3 Agustus 2000
- Oetama, Jacob, *Kemandirian Pers Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Mendatang*, dalam Tajuk-Tajuk Terik Matahari, Yayasan Keluarga Bkahti, Surabaya, 1993
- Jacob Oetama, *Kebebasan Pers Dalam Masyarakat Transisi*, makalah hari pers Nasional di Solo (Februari 2001
- Pangestuti, Sri *Peranan Pers Indonesia Dalam Mendorong Demokratisasi*, tesis UGM, 2000
- Pobottinggi, Mochtar, *Komunikasi Politik dan Transformasi Politik*, dalam *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Masfadi Rauf (ed) Gramedia Pustaka Utama.
- PS. Soegiyarto PS, *Jurnalisme Berwawasan, Pelatihan Meliput Pemilu 2004*, Yogyakarta

- 6 Agustus 2003.
- Rachmadi, F *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Pers di Berbagai Negara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990 , p.19-21
- Rais, Amin, *Demokrasi dan Proses Politik* , Prisma, LP3ES September, 1986
- Rokeach, Malvin DeFleur, Ball Rokeach, *Theories of Mass Communication, Fourth Edition, Longman, Inc. New York, 1982.*
- Santoso, Purwo, *Merajut Kohesi Nasionalisme Indonesia dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi*, Jurnal Sosial Politik, Volume 4, Nomor 3, Maret 2001.
- Setyawan, Dharma, *Pembinaan Sumberdaya Manusia Indonesia*, 1997, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Siagian, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siregar, Ashadi, *Kebebasan pers dan Posisi Pers Sebagai Kontrol Dari Masa ke Masa* , makalah dalam diskusi panel Universitas Wijayakusuma, Surabata, 11 Februari 1989.
- Siregar, Ashadi Siregar, *Kode Etik Jurnalistik Pelaksanaan dan Efektivitas Pengawasannya*, makalah pada seminar profesionalismedanetikadalam pemantapan kelembagaan pers nasional menyongsong era tinggal landas, Bajarmasin, 1991.
- Surdiasis, Nugroho, Bimo, Eriyanto dan Frans Surdiasis, *Politik Media Mengemas Berita; Habibie dalam pemberitaan Kompas, Merdeka dan Republika*, ISEI, Jakarta 1999.
- Sudibyoy, Agus, *Tinjauan teoritis analisis Framing, dalam Pantau edisi 10, Institut Studii Arus Informasi*, 2001.
- Susilastuti Dwi, *Kebebasan dan Tanggungjawab Pers Indonesia di Era Reformasi*, ceramah tentang sosialisasi kebebasan pers di Klaten, 1999.
- Susilastuti Dwi, 2001, *Penegakkan Kebebasan Pers Di Indonesia 1989-2000*, tesis S2, UGM
- Susilastuti, dkk, *Polling Kecenderungan Masyarakat DIY Memandang Persoalan Bangsa* , 2003, Lembaga Penulisan UPN “Veteran” Yogyakarta p. 9
- Syah , Sirikit, *Media Watch Tokoh Pers 1999*, Kompas, 6 Januari 2000.
- Syamsul Mu'arif, *Membangun Masyarakat Media Melalui Peace Journalism*, makalah pada Workshop Peace Journalisme oleh Lembaga Studi Pembangunan Masyarakat Sipil, di Yogyakarta 4 Oktober 2003.